

KONTRIBUSI ARKEOLOGI BAGI PENGEMBANGAN PULAU-PULAU KECIL DAN TERDEPAN DI SUMATERA BAGIAN UTARA

ARCHAEOLOGICAL CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF THE FRONTMOST AND SMALL ISLANDS IN NORTH SUMATRA

Naskah diterima:
02 Juni 2014

Naskah disetujui:
16 Oktober 2014

Baskoro Daru Tjahjono
Balai Arkeologi Medan
Jl. Seroja Raya Gg. Arkeologi No.1, Medan
baskoro_balaryk@yahoo.co.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan, terdiri atas puluhan ribu pulau, baik kecil maupun besar, dengan sebagian besar wilayahnya adalah lautan luas. Pulau-pulau kecil dan terdepan mempunyai potensi kelautan yang luar biasa, namun kekayaan hayati, keindahan alam, dan pertambangan belum dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan penghuninya. Untuk dapat mengembangkan pulau-pulau kecil dan terdepan secara optimal, perlu adanya reposisi kebijakan kelautan. Reposisi kebijakan kelautan adalah suatu kebijakan politik dan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi, yang meninggalkan paradigma lama yakni menempatkan sektor kelautan sebagai marginal, berubah menjadi arus utama dalam pembangunan ekonomi dengan tetap mengintegrasikannya dengan sektor daratan. Penelitian arkeologi di pulau-pulau kecil dan terdepan dapat memberi gambaran bahwa sebagian dari pulau-pulau itu pernah dihuni atau dimanfaatkan manusia pada masa lalu, sejak masa Prasejarah, masa Klasik, masa Islam, maupun masa Kolonial. Ini menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil dan terdepan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia masa kini, jika dikelola dengan serius. Untuk menjawab permasalahan itu digunakan metode penelitian deskriptif dengan penalaran induktif melalui penggabungan penelitian sejarah, filologi, dan arkeologi. Pengembangan berbagai potensi tinggalan arkeologis di pulau-pulau kecil dan terdepan yang merupakan hasil penelitian arkeologi merupakan kontribusi arkeologi bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan terdepan.

Kata kunci: kontribusi, arkeologi, pengembangan, pulau kecil, pulau terdepan

Abstract

An archipelago country consisting of tens of thousands of small and big islands, Indonesia is mostly of a vast waters territory. Despite the amazing maritime potentials they are posed, the small, frontmost islands still experience difficulties in maximizing their natural riches, beauty, and mining potentials for their prosperity. Maritime policy repositioning is significant to implement to optimize those frontmost, small islands' potentials. Such policy repositioning shall include economy and politics sectors to optimize people's welfare through the prioritization of our previously-abandoned maritime sector and integrate it with the land. The archaeological researches in small and frontmost islands may help describe the inhabiting of the islands by ancient people of such periods of pre-historic, classic, Islamic, or colonial. Such archaeological findings suggest the potentials of the small, frontmost islands to be used for the current Indonesian people's prosperity when handled with care.

Keywords: contribution, archaeology, development, small islands, front most islands

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan karena daratan Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau kecil dan besar,

baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Sebagian besar wilayahnya adalah lautan luas yang mempunyai kekayaan hayati yang luar biasa. Pulau-

pulau kecil dan terdepan adalah wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Pulau-pulau kecil dan terdepan adalah halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wajah Indonesia. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil dan terdepan harus menjadi prioritas utama.

Pulau-pulau kecil dan terdepan itu sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan kelautan. Lautan di sekeliling pulau-pulau itu menyimpan kekayaan hayati dan alam yang luar biasa, yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di pulau-pulau itu. Namun hingga saat ini kekayaan hayati dan alam itu belum dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Pulau-pulau kecil dan terdepan, sebagaimana wilayah-wilayah perbatasan lainnya masih sering dianggap sebagai halaman belakang wilayah Negara dan bukan sebagai halaman depan, sehingga pembangunan di wilayah ini sering terabaikan.

Permasalahan utama adalah mengapa bangsa ini yang dikaruniai kelimpahan kekayaan alam dan hayati dengan wilayah lautnya yang sangat luas tidak dapat memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyatnya. Apakah karena bangsa Indonesia tidak lagi berorientasi kepada wawasan maritim

atau bahari akibat rekayasa sosial yang telah dilakukan oleh penjajah Belanda pada masa lalu. Dengan demikian, walaupun telah mendeklarasikan diri sebagai negara kepulauan berdasarkan deklarasi Djuanda, tetapi arah pembangunan nasional masih menggunakan paradigma darat atau kontinental (agraris) peninggalan penjajahan Belanda. Lalu, apakah yang dapat disumbangkan oleh arkeologi -- yang salah satu bidangnya adalah arkeologi maritim -- untuk mengembangkan pulau-pulau kecil dan terdepan agar dapat menyejahterakan rakyatnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penyebab belum dimanfaatkannya kelimpahan kekayaan alam dan hayati laut Indonesia secara maksimal, untuk mengetahui karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari, serta untuk mengetahui potensi tinggalan arkeologis dan kontribusinya bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan terdepan di Sumatera bagian utara.

Untuk menjawab permasalahan itu digunakan metode penelitian deskriptif dengan penalaran induktif melalui penggabungan penelitian sejarah, filologi, dan arkeologi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder, yaitu hasil kajian sejarah dan filologi dari para pakar di bidangnya, hasil penelitian arkeologi yang pernah dilakukan oleh Balai

Arkeologi Medan, serta data kepustakaan lainnya.

Adapun landasan pemikirannya adalah bahwa kemakmuran dan kebesaran Indonesia akan terlihat langsung oleh negara-negara tetangga dari kondisi wilayah perbatasannya, khususnya kondisi di pulau-pulau kecil dan terdepan yang merupakan halaman depan atau wajah Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan pulau-pulau kecil dan terdepan tersebut agar masyarakatnya sejahtera. Pengembangan pulau-pulau kecil dan terdepan hanya dapat dilakukan jika ada kemauan yang kuat untuk mengubah kebijakan pembangunan yang selama ini berorientasi ke daratan saja menjadi ke kelautan dengan mengintegrasikannya dengan daratan. Berbagai potensi – seperti kekayaan alam dan hayati – di pulau-pulau itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengembangkan pulau-pulau kecil dan terdepan tersebut. Salah satu potensi yang ada di pulau-pulau itu, yang bisa dikembangkan adalah potensi tinggalan arkeologis.

2. Hasil

2.1. Pulau-pulau Kecil dan Terdepan di Sumatera Bagian Utara

Setelah melalui beberapa kajian ilmiah dan kesepakatan dikaitkan dengan kebijakan pengelolaan wilayah bagi sebuah negara kepulauan, maka telah

ditetapkan bahwa pengertian unsur geografis “pulau” berdasarkan UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 atau dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Bab VIII pasal 121 (selanjutnya baca Bab XI) yang disimpulkan bahwa daratan dan batu-batuan (*rocks*) yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air laut dan tidak tenggelam pada saat air tinggi adalah pulau (Rais, dkk. 2008, 130).

Dari segi hukum laut ada dua unsur dalam rezim pulau, yaitu pulau (*island*) itu sendiri dan batu-batuan (*rocks*) yang tidak dapat mendukung kehidupan atau kehidupan ekonomis. Adapun yang tidak termasuk pulau adalah unsur geografis yang tidak berada di atas muka laut ketika air pasang, seperti gosong, kumpulan mangrove yang tumbuh di dasar laut yang dangkal sehingga tidak tampak daratan walaupun air laut surut, dan batu-batuan ketika pasang dikelilingi laut tetapi jika surut menyatu dengan daratan (Rais, dkk. 2008, 121--123).

Pulau-pulau kecil dan terdepan merupakan salah satu wilayah Indonesia yang berada di daerah perbatasan dengan negara lain, selain daerah perbatasan berupa daratan seperti di Kalimantan, Papua, dan Timor. Pulau-pulau kecil dan terdepan di wilayah Sumatra bagian utara tersebar antara lain di wilayah-wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Sebagian

besar pulau-pulau itu berada di sepanjang selat Malaka dan laut Cina Selatan, yang berbatasan dengan negara-negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Pulau-pulau kecil dan terdepan di wilayah Sumatra bagian utara, seperti daerah perbatasan lainnya, tentu mempunyai banyak permasalahan. Pulau-pulau itu merupakan daerah terpencil, dengan sarana dan prasarana yang sangat minim mengakibatkan kurangnya kesejahteraan serta keamanan bagi penghuninya.

Di wilayah Provinsi Sumatera Utara terdapat pulau-pulau kecil yang belum digarap dan dikembangkan untuk mendukung pembangunan daerah. Pulau-pulau dimaksud, sebagian berpenghuni dan sebagian lagi tidak berpenduduk, bahkan banyak di antaranya belum bernama, yang menyimpan potensi kelautan dan perikanan. Konsentrasi pulau-pulau tersebut menempati bagian sebelah barat Kabupaten Nias dan sebelah selatan Kabupaten Nias Selatan. Begitupun dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang gugusan pulau-pulainya di bagian utara dan barat berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia. Kemudian Provinsi Riau yang berbatasan langsung dan begitu dekat jaraknya dengan Singapura dan Malaysia. Provinsi Sumatera Barat bagian baratnya dipagari Kepulauan Mentawai, dan Provinsi Aceh juga memiliki gugusan pulau di bagian barat, utara, dan timur. Selain perikanan

dan kelautan, di pulau-pulau itu dapat dikembangkan pertanian dan industri pariwisata melalui keindahan alam dan tinggalan budayanya.

Pemilikan sejumlah besar peninggalan kuna sebagai sisa kehidupan masa lampau sampai pada tradisi yang ada sekarang, menjadikan Nusantara – negeri dengan ribuan pulau – satu kawasan penting di dunia dalam memahami peradaban manusia. Sumatera sebagai bagian Nusantara -- sebagaimana disebutkan oleh sumber sejarah -- merupakan matarantai jalur pelayaran dan perdagangan yang mulai marak pada abad ke-5 dan ke-6. Komoditas yang dihasilkannya, seperti kapur barus, kemenyan, dan mur diburu para pedagang Cina, Arab, Persia, dan Pakistan Barat (Wolters 2011, 12--13).

Pulau-pulau kecil dan terdepan itu sebenarnya mempunyai potensi kelautan yang luar biasa, namun kekayaan hayati, keindahan alam, dan pertambangan belum dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan penghuninya. Hal ini disebabkan karena pembangunan kelautan selama tiga dasawarsa terakhir selalu diposisikan sebagai sektor pinggiran (*peripheral sector*) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan,

bukan menjadi arus utama (*mainstream*) dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi ironis mengingat hampir 70 % wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis yang penting, yakni lautan Pasifik dan lautan Hindia – kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik di dunia. Akibatnya secara ekonomi-politis sangat logis jika bidang kelautan dijadikan tumpuan dalam pembangunan ekonomi nasional. (Kusumastanto 2002, 1).

2.2. Penelitian Arkeologi di Pulau-pulau Kecil dan Terdepan di Sumatera Bagian Utara

Wilayah kerja Balai Arkeologi Medan yang sangat luas meliputi 5 provinsi – Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau – tidak saja berupa daratan Sumatera, tetapi juga termasuk pulau-pulau beserta lautan di sekelilingnya. Oleh karena itu, menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan kajian arkeologi maritimnya melalui penelitian di kawasan pulau-pulau kecil dan terdepan.

Balai Arkeologi Medan telah beberapa kali melakukan penelitian di kawasan pulau-pulau tersebut, sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2013. Penelitian megalitik di Pulau Ungar, Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, tahun 1998/1999

menemukan areal situs megalitik seluas kurang lebih 1 Ha dan terletak di pinggir laut. Tinggalan megalitiknya antara lain berupa batu kelamin (*phallus*), batu tapak kaki, dan lesung batu (Wiradnyana 1998/1999).



Gambar 1. Tangga masuk bekas istana Damnah di Pulau Lingga, Kepulauan Riau (Sumber: Balar Medan, 2001)

Penelitian epigrafi di Situs Pasir Panjang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, tahun 1999 menemukan sebuah prasasti yang terdiri atas 3 baris, ditulis dengan aksara Nagari dan bahasa Sansekerta. Isinya tentang pemujaan kepada sang Buddha melalui tapak kakinya. Prasasti itu berbunyi:

*maha-ya-nika
golapan.d.ita-śri-
gautamaśri-pa-da-*

Menurut Suhadi, kalimat itu dapat diterjemahkan sebagai berikut: *Maha suci tapak kaki Buddha Gautama, yang dihormati oleh pendeta dari Gola (Bengal), pemeluk agama Buddha Mahayana* (Suhadi 1999, 12).

Penelitian arkeologi di Pulau Lingga, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2000 menemukan sisa-sisa bangunan istana Damnah, pondasi bilik 44, masjid Sultan Lingga, bekas masjid lama, Benteng Bukit Cening, benteng Pulau Mepar, makam-makam, dasar tiang bendera dan pilar bangunan, rumah tradisional, dan sumur tua (Koestoro et al. 2001, 5--21).

Penelitian arkeologi di Situs Bukit Kerang (*kyokkenmoddinger*) Kawal Darat, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010 menguatkan dugaan bahwa situs ini merupakan situs prasejarah dengan hunian aktif hingga sekitar tahun 300 M. Selanjutnya tahun 2011 dan tahun 2012 dilakukan penelitian terapan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan situs tersebut (Simatupang et al. 2012, 123).



Gambar 2. Situs Bukit Kerang (*Kyokkenmoddinger*) Kawal Darat di pulau Bintan kepulauan Riau (Sumber: Balar Medan, 2012)

Penelitian arkeologi di Pulau Cingkuk, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dilakukan dalam beberapa tahap dari tahun 2000 hingga

tahun 2007. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa di situs itu pernah berdiri loji Belanda, sebagaimana disebutkan dalam beberapa sumber tertulis. Berdasarkan data sejarah Pulau Cingkuk telah dimanfaatkan Belanda sebagai suatu permukiman sejak tahun 1664. Selain sisa-sisa struktur bangunan, tembok dengan gerbang-gerbangnya, beragam temuan hasil ekskavasi – seperti keramik asing, koin VOC, paku logam, palu, fragmen logam, sumur – memperkuat dugaan tentang pemanfaatan Pulau Cingkuk sebagai permukiman Belanda (Koestoro 2007, 23--35).

Penelitian arkeologi di Kota Tanjungpinang, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2004 meliputi 4 kecamatan. Di Kecamatan Tanjungpinang Timur terdapat situs-situs: Kota Piring, kompleks makam Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, kompleks makam di Kampung Sungai Timun, situs Kota Lama/ Kota Rebah, kompleks makam Daeng Marewah, kompleks makam Daeng Celak, kompleks makam Sultan Ibrahim, dan kompleks makam Panglima Garang. Di Kecamatan Bukit Bestari terdapat situs-situs: makam Tanjung Unggat dan makam Kayu Are. Di Kecamatan Tanjungpinang Barat terdapat situs-situs: sisa benteng di kompleks RSAL Tanjungpinang, kompleks makam Daeng Kemboja, *kerkhoff* (kuburan) Belanda, gedung Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang, gedung Dinas Pariwisata kabupaten Kepulauan

Riau, gereja GPIB Bethel, dan rumah Jil (*jail* = penjara). Di Kecamatan Tanjungpinang Kota terdapat situs-situs: Senggarang, vihara Dharma Sasana, *The Banyan Tree Temple*, klenteng Fan Kong, dan Pulau Penyengat (Koestoro 2004, 13--35).



Gambar 4. Makam keramat Siantan Pulau Matak
(Sumber: Balar Medan, 2011)

Penelitian di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2005 dilakukan di 5 kecamatan yaitu: Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Siantan, dan Kecamatan Palmatak. Hasil penelitian di Kabupaten Natuna itu dapat dikelompokkan menjadi tinggalan monumental dan artefaktual. Tinggalan monumental antara lain berupa: makam-makam kuna (makam Islam, makam Cina (*Bong*), dan makam Kristen), bangunan kolonial/ Indis, masjid kuna, kelenteng, dan sisa benteng. Di samping itu, ditemukan juga tinggalan artefaktual, antara lain:

Kontribusi Arkeologi Bagi Pengembangan Pulau-Pulau Kecil dan Terdepan di Sumatera Bagian Utara (Baskoro Daru Tjahjono)

fragmen keramik (Cina, Vietnam, dan Eropa), fragmen tembikar, fragmen kaca, fragmen logam, meriam, senjata tajam (keris dan tombak), cap/ stempel, tongkat, alat batu (serpih, beliung persegi, batu giling atau *grindingstone*, dan tatal). Dari hasil penelitian itu tampak bahwa peninggalan arkeologis yang tersisa di wilayah Kabupaten Natuna merupakan akibat dari perjalanan panjang kawasan ini dalam sejarah kebudayaan Nusantara, yang meliputi masa prasejarah hingga sejarah (Susilowati 2011, 127--147).



Gambar 3. Beliung persegi di Batu Sindu pulau Bunguran kepulauan Riau
(Sumber: Balar Medan, 2011)

Penelitian arkeologi di wilayah Provinsi Sumatra Utara, tahun 2006 meliputi Pulau Berhala, Pulau Sokong Nenek, Pulau Pandang, dan Pulau Salahnama. Pulau Berhala dan Pulau Sokong Nenek secara administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Pulau Pandang dan Pulau Salahnama masuk dalam wilayah Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara. Adapun

hasil survei di Pulau Berhala ditemukan: batu tapak dan mercusuar. Menurut informasi bangunan mercusuar yang ada saat ini dibangun di atas bangunan lama yang telah dirobohkan. Mercusuar baru dibangun tahun 1983 karena bangunan yang lama telah rusak. Survei di Pulau Sokong Nenek yang berada sekitar 100 m di sebelah timur Pulau Berhala menemukan umpak bangunan. Pulau Sokong Nenek ini tidak berpenghuni, di bagian tengah memiliki kontur meninggi berbentuk bukit, selebihnya merupakan kelerengan yang cukup terjal.

Puncak bukit ini mempunyai ketinggian 25 m dpal. Pada jarak 36 m arah utara dari puncak ditemukan sisa-sisa umpak bangunan berbentuk persegiempat terbuat dari bata dengan spesi semen. Umpak-umpak itu berjumlah 20 buah dengan ukuran tinggi bervariasi antara 30 – 100 cm dengan keletakan tidak beraturan. Pada bagian atas beberapa umpak terdapat bekas tumpuan balok kayu bangunan. Pulau Pandang oleh masyarakat lebih dikenal dengan nama Pulau Pandan, terletak 30 mil arah timur laut dari Pulau Salahnama. Pulau ini berorientasi utara-selatan, di bagian utara struktur tanahnya meninggi membentuk perbukitan, sedangkan di bagian selatan berupa dataran rendah. Beberapa temuan yang terdapat di Pulau Pandang antara lain: batu bilah/ belah, batu tapak, struktur bangunan penjara Belanda, mercusuar, gua Jepang, dan pecahan batu granit.

Pulau Salahnama merupakan pulau yang paling dekat dengan Pulau Pandang. Survei di Pulau Salahnama hanya menemukan sebuah gua alam. Gua ini beratap rendah sehingga untuk mencapai bagian dalam harus membungkukkan badan. Bagian dalam gua cukup lebar yang memungkinkan dimasuki beberapa orang. Ukuran panjang dan lebar gua berkisar antara 8 m x 6 m dengan ketinggian atap paling tinggi 2 m. Di dalam gua tersebut terdapat temuan lepas yang mengindikasikan bekas-bekas adanya aktivitas hunian, yaitu fragmen gerabah dan botol. Menurut informasi setempat gua itu pernah digunakan sebagai tempat bertapa. Sehingga belum dapat dipastikan apakah gua ini pada masa lalu pernah digunakan sebagai tempat hunian, untuk itu perlu penelitian lebih mendalam dan intensif (Sutrisna 2012, 71--95).



Gambar 5. Mercusuar di Pulau Pandang
(Sumber: Balar Medan, 2012)

Penelitian arkeologi juga dilakukan di Situs Pulau Kampai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013. Pulau Kampai terletak di Teluk Aru, tempat bermuaranya sejumlah sungai dari daratan Pulau Sumatera, antara lain: Sungai Besitang, Sungai Salahaji, dan Sungai Serangjaya. Nama Kampai sudah tercatat dalam kitab Nagarakrtagama, karya Prapanca pada pertengahan abad ke-14 M. Naskah tersebut menyebutkan bahwa: *“kāmpē harw āthawe maṇdahiliṅ i tumihanṅ parllāk mwaṅ i barat”*. Kampe adalah nama tempat di Malayu (Sumatera) yang berada di bawah perlindungan Kerajaan Majapahit pada waktu itu. Sedangkan Harw dapat disamakan dengan Aru (nama teluk di pesisir Kabupaten Langkat). Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian itu antara lain: fragmen keramik, fragmen tembikar, manik-manik berbagai ukuran (berbahan batuan dan kaca), fragmen wadah (berbahan kaca, besi, perunggu, dan tembaga), koin-koin (Cina maupun Hindia Belanda), dan benda-benda berbahan batu. Berdasarkan temuan fragmen keramik Cina dapat diperkirakan bahwa aktivitas budaya di Pulau Kampai sudah dimulai sejak abad ke-11 hingga abad ke-14 M. Pada masa lebih muda peradaban Islam masuk ke pulau ini sekitar abad ke-16 hingga abad ke-18, berdasarkan pada temuan nisan-nisan batu Aceh (Soedewo et.al 2013, 4--53).

3. Pembahasan

Kontribusi Arkeologi Bagi Pengembangan Pulau-Pulau Kecil dan Terdepan

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pulau-pulau kecil dan terdepan yang kita miliki harus dikembangkan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin, baik kekayaan hayati maupun tambangnya. Oleh karena itu, harus dikembangkan jiwa bahari bagi seluruh masyarakat Indonesia. Agar dapat mengembangkan pulau-pulau kecil dan terdepan secara optimal, perlu adanya reposisi kebijakan kelautan (*ocean policy*). Reposisi kebijakan kelautan (*ocean policy*) adalah suatu kebijakan politik dan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi yang meninggalkan paradigma lama yakni menempatkan sektor kelautan sebagai marjinal (*periphery*), berubah menjadi arus utama (*mainstream*) dalam pembangunan ekonomi dengan tetap mengintegrasikannya dengan sektor daratan, sehingga kebijakan ini menjadi visi bersama bagi semua komponen bangsa yang berperan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi di Indonesia. Untuk menjabarkan *ocean policy* menjadi sebuah *mainstream* pembangunan ekonomi, maka harus dikembangkan dalam kerangka pemikiran ekonomi yang disebut sebagai *oceanomics*. *Oceanomics* didefinisikan sebagai ilmu atau pemikiran ekonomi dalam mendayagunakan sumberdaya

kelautan sebagai basis dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan (Kusumastanto 2002, 9--10).

Pada awalnya bangsa Indonesia adalah bangsa bahari dan bangsa niaga, akibat penjajahan Belanda telah terjadi rekayasa sosial (*social engineering*) sehingga mengubahnya menjadi bangsa agraris. Pada waktu pemerintahan RI di bawah Perdana Menteri Ir. H. Djuanda telah dirintis awal perubahan paradigma Pembangunan Nasional darat peninggalan penjajahan Belanda, yang tidak selaras dengan kondisi wilayah negara yang sebagian besar lautan, yaitu dengan mendeklarasikan secara sepihak (*unilateral*) pada 13 Desember 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda isinya menyatakan bahwa negara bangsa RI adalah suatu negara kepulauan (Adiwijoyo 2005, 33). Menurut Irawan Djoko Nugroho, bukan bangsa Belanda yang menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa agraris – sekalipun mereka penyebab langsung proses itu -- melainkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Dominasi perdagangan laut Jawa berakhir ketika panglima Pajang – Senapati – memberontak terhadap ahli waris sah Pajang dan membubarkan serta menelantarkan armada lautnya. Senapati yang memproklamirkan diri sebagai panembahan, kemudian mengisolasi Jawa dari dunia luar. Sejak saat itu negara

maritim yang demikian dominan di kawasan Jawa berakhir. Tindakan Senapati yang menjauhkan Jawa dari negara maritim dan pola pikir maritim membuat Jawa dan Nusantara dengan cepat mengalami kemunduran (Nugroho 2011, 11--12).

Di era orde baru yang bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, pada awalnya telah melaksanakan pembangunan di pedesaan sebagai basis. Karena itu pekik dan teriakan “politik sebagai panglima” dirubah dengan derap pembangunan “ekonomi sebagai panglima”. Tetapi sayangnya para elit politik dan elit ekonomi justru tidak merubah visi, landasan, dan paradigma pembangunan nasional yang digunakan dan hanya melanjutkan paradigma darat atau kontinental (agraris) peninggalan penjajahan Belanda, yang sesungguhnya merupakan hasil rekayasa sosial untuk memarginalkan bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari dan bangsa niaga. Bukan bertekad untuk melanjutkan dan mengembangkan Deklarasi Djuanda dengan melakukan perubahan terhadap paradigma pembangunan nasional yang berwawasan kelautan atau kebaharian (*ocean policy*) secara murni dan konsekuen. Termasuk dalam membangun karakter bangsa (*national character building*) guna mengembalikan (*back to basic*) jatidiri sebagai bangsa bahari dan bangsa niaga. Pembangunan di sektor

pertanian hanya difokuskan untuk mencapai program swasembada pangan (khususnya beras), sektor kelautan masih tetap dimarginalkan. Sektor industri justru diprioritaskan karena dapat menyerap banyak tenaga kerja (dengan upah murah), meskipun hanya menggunakan bahan baku dari luar negeri. Oleh karena itu, pembangunan lebih terpusat di Pulau Jawa, sedangkan di luar Pulau Jawa justru lebih menonjol kepada eksploitasi hutan (kayu) dan berbagai tambang. Akibatnya, bukan saja menciptakan ketidakadilan, melainkan juga sangat rentan terhadap dinamika perubahan tata ekonomi dunia. Begitu terjadi krisis moneter, maka rakyat golongan menengah ke bawah terutama kaum buruh, petani, dan nelayan menjadi korban. Mereka yang sementara ini hidupnya tetap dalam keadaan miskin (harta dan ilmu) semakin sulit mencari sandang-pangan. Padahal jumlah pengangguran dan korban PHK semakin banyak (sekitar 40 juta jiwa). Di lain pihak, kekayaan laut, terutama ikan di sepanjang ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) malah ditelantarkan dan dibiarkan dicuri oleh sekitar 6000 kapal ikan asing. Selain itu, ijin penangkapan ikan di ZEE dikeluarkan hanya kepada pengusaha tertentu, sehingga menjadi semacam pengkaplingan wilayah laut. Baik mereka yang bekerja sama dengan pengusaha dari negara asing atau hanya menerima *fee* dari armada kapal ikan asing yang berbendera merah-putih, itupun hanya

sepersepuluhnya dalam arti jika yang mendapat ijin 10 buah, maka yang beroperasi sampai 100 buah kapal (Adiwijoyo 2005, 33--34).

Pemanfaatan bukti sejarah dan arkeologi adalah pendekatan yang dianggap relevan. Arkeologi membantu mengisi kesenjangan tentang pengetahuan sejarah yang ada. Arkeologi maritim misalnya, memberikan sumbangan untuk mengerti sejarah dan arkeologi di Asia Tenggara. Kegiatannya mampu menyodorkan bukti baru, antara lain, tentang sejarah pembangunan perahu serta mekanisme hubungan dagang regional (Utomo 2007, 161). Kajian aspek kebaharian dalam kebudayaan Indonesia mampu membantu pengenalan bahwa masyarakat di kawasan Asia Tenggara tidak hanya merupakan pengarang laut yang berpengalaman atau hanya pedagang kecil-kecilan di lingkungan pulaunya saja, tetapi juga berperan aktif dalam merajut jaringan dagang dunia masa lampau. Mereka termasuk di dalamnya orang Indonesia, adalah juga bangsa wiraswasta yang biasa merantau, berlayar, dan berdagang ke berbagai penjuru dunia serta menjalin kontak budaya dengan sesama manusia dari berbagai penjuru dunia (Utomo 2007, 167).

Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*Archipelago*) tentu menaruh perhatian terhadap pulau-pulau yang bertebaran dari Sabang – Merauke yang

merupakan aset nasional dan perlu dikembangkan dalam pembangunan ekonominya atau usaha konservasi dalam melindungi warisan budayanya dan sumberdaya hayatinya. Dengan kekalahan Indonesia di Mahkamah Internasional di Den Haag tentang sengketa dua pulau Sipadan dan Ligitan, telah membuka mata bangsa Indonesia bahwa administrasi dan pengelolaan pulau-pulainya selama ini terabaikan dengan banyaknya pulau-pulau tak bernama dan tidak tertibnya administrasi kewilayahan di daerah dan di pusat. Menyadari kelemahan-kelemahan selama ini dalam administrasi wilayah, khususnya administrasi pulau-pulau kecil yang bertebaran, sejak tahun 2005 Pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan, memperoleh anggaran untuk memulai survei di laut untuk mengunjungi setiap pulau guna menentukan posisinya dan namanya dari penduduk setempat atau orang-orang di daerah yang mengenal pulau-pulau tersebut untuk memperoleh nama sesuai dengan Resolusi UNCSGN No. 4 Tahun 1967, Rekomendasi B. Betapapun jauhnya pulau-pulau tersebut harus dikunjungi melalui lautan yang kadang-kadang tidak bersahabat (Rais, dkk. 2008, 125--126).

Survei toponim pulau di laut harus dilaksanakan selengkap mungkin, karena kegiatan ini mahal dan berbahaya karena harus mendatangi tiap pulau betapapun jauhnya. Oleh karena itu, hendaknya "sekali dayung dua tiga pulau terlampaui".

Selain mengumpulkan data tentang posisi geografis dengan GPS dan nama pulau melalui interview dan diskusi dengan masyarakat setempat, juga dikumpulkan data bio-fisik dari pulau, seperti penduduk, pekerjaan penduduk jika ada, luas lahan, jenis vegetasi, kegiatan ekonomi pulau dan data morfologi pulau. Tiap unsur di laut didatangi walaupun itu kumpulan mangrove sekalipun atau batu-batuan, dan diperhatikan bagaimana keadaan pada waktu air pasang. Kumpulan mangrove yang ada namanya karena rakyat melihatnya sebagai pulau dan memberi nama tetap dicatat dan akhirnya didaftar masuk klasifikasi bukan pulau tetapi mangrove, begitu juga gosong yang ditemukan dan jika sudah ada namanya dikumpulkan dalam daftar gosong sebagai unsur bawah laut. Kedua daftar ini penting bagi instansi yang mengelola mangrove sebagai sumberdaya hayati untuk konservasi/pemanfaatan dan unsur bawah laut disampaikan kepada Kelompok Kerja Penamaan Unsur Bawah Laut dari Pusat Geologi Kelautan (Rais, dkk. 2008, 126--127).

Ada karya besar yang pernah dihasilkan dalam bidang onomastik, khususnya yang menyangkut Indonesia, terutama Jawa, sejak ditemukannya nama-nama dalam prasasti yang paling awal hingga masa pemerintahan raja Pu Sindok di Jawa Timur (abad ke-10). Kajian itu ternyata tidak hanya membatasi diri pada nama yang berkenaan dengan toponimi

dan antroponimi, namun juga mencakup hal-hal lain, yaitu teknonimi, pangkat dan jabatan, pekerjaan dan profesi, kelompok kerja yang kurang jelas jatidirinya dan istilah lain yang masih meragukan (Rais, dkk., 2008, 54).

Penelitian arkeologi yang pernah dilakukan oleh Balai Arkeologi Medan di pulau-pulau kecil dan terdepan – walaupun belum banyak -- paling tidak telah memberi gambaran bahwa sebagian dari pulau-pulau itu pernah dihuni atau dimanfaatkan manusia pada masa lalu, sejak masa Prasejarah, masa Klasik, masa Islam, maupun masa Kolonial. Ini menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil dan terdepan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan saat ini untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, asal dikelola dengan serius. Keseriusan itu antara lain menyiapkan sarana-prasarana serta keamanan di pulau-pulau tersebut agar layak huni. Penelitian arkeologi juga memberi kesadaran sejarah masa lampau bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang besar, yang telah memanfaatkan laut sebagai sumberdaya dan prasarana, bukan sebagai penghambat atau pemisah hubungan antar pulau. Keanekaragaman sisa-sisa hasil budaya manusia masa lalu yang mendiami pulau-pulau kecil terdepan, yang dihasilkan melalui penelitian arkeologi, jika dikembangkan bisa menjadi objek wisata budaya yang menarik. Objek wisata budaya dipadukan dengan objek wisata alam yang berbasis pada wisata

bahari juga dapat menyejahterakan masyarakat penghuni pulau-pulau kecil dan terdepan tersebut. Pulau-pulau kecil dan terdepan yang masih belum berpenghuni atau belum dimanfaatkan bisa diberikan secara cuma-cuma kepada bangsa yang masih sangat membutuhkan tempat tinggal atau dimanfaatkan sebagai pangkalan-pangkalan Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan NKRI. Program transmigrasi bisa dihidupkan kembali, sehingga sedikit demi sedikit akan mengurangi pengiriman TKI/ TKW ke luar negeri.

Kerajaan-kerajaan besar pada masa Hindu-Buddha di Nusantara, seperti Sriwijaya dan Majapahit, telah menguasai laut dengan armadanya dan memanfaatkannya untuk mempersatukan Nusantara. Sriwijaya berperan penting dalam perdagangan Asia pada pertengahan abad ke-7 M, selama lebih dari 500 tahun. Setelah sejarahnya dihidupkan kembali oleh para sejarawan modern, kerajaan ini menjadi terkenal dalam sejarah Indonesia, terutama di kalangan orang Indonesia. Mereka membanggakannya sebagai kekuatan laut yang besar dan kerajaan tertua dalam sejarah kebangsaan Indonesia (Wolters 2011, 1).

Kebesaran Kerajaan Sriwijaya dapat diketahui dari berita-berita Cina seperti catatan I Tsing (671-695 M), Hsin T'ang Shu (pertengahan abad 11), dan ensiklopedi Ts'e Fu Yuan Kuei (awal abad

11) serta prasasti-prasasti Melayu kuna di Sumatera Selatan (682-686 M). pedagang Cina I Tsing adalah orang pertama yang membuat catatan tentang kerajaan ini. Pada tahun 671 M ia menceritakan pelayarannya dari Kanton ke Palembang, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Sriwijaya juga diketahui memiliki banyak kapal, pada tahun 672 M I Tsing berlayar dari Sriwijaya ke India dengan sebuah kapal milik raja. Menurut I Tsing, kerajaan ini menjadi sangat kuat dalam jangka waktu 24 tahun. Kedah di pantai barat Semenanjung Melayu Selatan menjadi jajahan Sriwijaya. Pada tahun 775 M kerajaan ini menjadi begitu terkenal, sehingga penguasanya disebut “raja yang dipertuan dari Sriwijaya, raja tertinggi di antara semua raja di muka bumi”. Pada masa itu Sriwijaya merupakan pusat perdagangan yang sangat terkenal. Oleh karena itu, wajar jika diyakini terdapat latar belakang ekonomi di Asia Tenggara dan barangkali juga di tempat lain di Asia, yang selama berabad-abad telah memberi jalan bagi kejayaan Sriwijaya (Wolters 2011, 1--2).

Kebesaran Kerajaan Sriwijaya tidak diperoleh serta merta tetapi penuh dengan perjuangan dan masa pergolakan. Masa pergolakan itu tergambar dalam uraian beberapa prasasti. Prasasti Telaga Batu dari Palembang (tidak diketahui angka tahunnya) berisi sumpah yang luar biasa panjangnya, diiringi dengan meminum air kutukan, yaitu air yang harus diminum oleh

hamba raja untuk menjamin kepatuhan mereka. Selain itu juga terdapat dua buah prasasti yang merupakan bentuk singkatan dari sumpah itu yaitu Prasasti Karang Brahi (tidak berangka tahun) ditemukan di dekat sungai di bagian tengah Sumatera Selatan dan Prasasti Kota Kapur (686 M) yang dibuat di Pulau Bangka. Prasasti Telaga Batu memaparkan daftar panjang tentang orang-orang yang berpotensi menjadi musuh dan musuh-musuh raja Sriwijaya, mulai dari putra-putra para raja hingga tukang cuci dan budak-budak hamba, juga para nahkoda dan para pedagang. Dalam Prasasti Kota Kapur (686 M), disinggung juga peperangan yang dilakukan terhadap *Bhumi Java* yang belum tunduk kepada Kerajaan Sriwijaya. Sekalipun terdapat masalah-masalah politik seperti tercatat dalam prasasti-prasasti itu, pada pertengahan abad ke-8 Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menjadi sebuah kerajaan besar. Dalam buku Hsin T'ang Shu dinyatakan bahwa “Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang terbagi menjadi dua, dan kedua bagian kerajaan itu memiliki pemerintahan yang terpisah”. “Kerajaan barat” bernama Lang-P'o-Lu-Ssu, yang biasanya dipahami sebagai transkripsi dari “Barus” di sebelah utara Sumatera (Wolters 2011, 3--4).

Dalam bukunya “Majapahit Peradaban Maritim”, Irawan Djoko Nugroho menyimpulkan bahwa Jawa -- sejak kerajaan Kaling, Medang, Kahuripan, Kadiri, Singasari, hingga Majapahit --

merupakan kerajaan maritim nasional. Mereka menguasai tujuh zona komersial Asia yang meliputi *pertama*, zona Teluk Benggala, mencakup India Selatan, Sri Lanka, Birma, dan pantai utara Sumatra; *kedua*, kawasan Selat Malaka; *ketiga*, kawasan laut Cina Selatan, meliputi pantai timur semenanjung Malaysia, Thailand, dan Vietnam Selatan; *keempat*, kawasan Sulu, mencakup pantai barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pantai utara Kalimantan; *kelima*, kawasan Laut Jawa, meliputi kawasan Kalimantan Selatan, Jawa, Sulawesi, Sumatra, dan Nusa Tenggara; *keenam*, kawasan Laut Arab, meliputi Cochin, Malabar, Oman, dan Aden; dan *ketujuh*, kawasan Laut Merah, meliputi Mombasa, Mogadishu, Muza, Berenike, yang berujung di Alexandria (Nugroho 2011, 13--44). Dengan menguasai tujuh zona komersial Asia tersebut maka Jawa menguasai perdagangan Asia.

Kemajuan perdagangan pada masa Raja Airlangga, mengakibatkan Jawa mengalami masa kemakmuran panjang sehingga membutuhkan dukungan tenaga kerja besar. Jawa maupun pulau-pulau utama kawasan perdagangan tidak mampu menyediakan tenaga-tenaga tersebut. Untuk mengantisipasinya, tenaga kerja kasar didatangkan dari Zanzibar Afrika, Negrito, dan Papua. Dalam prasasti Garaman (1053 M) dan prasasti Waharu IV, para tenaga kasar itu disebut *jenggi* (Zanzibar),

pujut (Negrito), dan *bondan* (Papua) (Nugroho 2011, 39). Jadi kalau jaman sekarang kita justru mengirim TKI/ TKW ke luar negeri berarti suatu kemunduran besar bagi bangsa ini.

Dalam komentarnya terhadap buku "Majapahit Peradaban Maritim" tersebut, Supratikno Rahardjo (Nugroho 2011, ii) mengatakan, sebagai ahli filologi Irawan mengandalkan informasinya berdasarkan sumber-sumber tertulis yang memuat keterangan tentang kapal-kapal beserta aspek-aspek lain yang terkait, seperti bentuk, bahan, ukuran, dan kemungkinan muatannya. Data ini akan menjadi tantangan menarik bagi para ahli arkeologi untuk menemukan buktinya melalui kajian arkeologi maritim. Sebagai salah satu zona komersial Asia – kawasan Selat Malaka – yang merupakan jalur pelayaran yang ramai pada masa lalu hingga masa kini, kemungkinan besar menyimpan kekayaan budaya yang belum dieksplorasi pada masa kini. Tentu banyak kapal-kapal tenggelam -- akibat bencana alam maupun peperangan -- yang kemungkinan memuat hasil-hasil budaya antar bangsa yang bisa diteliti melalui kajian arkeologi maritim pada umumnya dan arkeologi bawah air pada khususnya.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelimpahan kekayaan alam dan kekayaan hayati laut Indonesia

belum dimanfaatkan secara maksimal, karena orientasi pembangunan Indonesia masih menggunakan paradigma darat atau kontinental (agraris), dan belum berorientasi pada pembangunan sektor kelautan.

Melalui penelitian sejarah, filologi, dan arkeologi dapat diketahui bahwa karakter bangsa Indonesia sebenarnya adalah bangsa bahari atau maritim. Penelitian sejarah menunjukkan adanya 2 kerajaan besar di Nusantara yang dikenal sebagai kerajaan maritim, yaitu Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa. Penelitian filologi yang dilakukan oleh Irawan Djoko Nugroho menunjukkan bahwa tidak hanya Sriwijaya dan Majapahit yang merupakan kerajaan maritim. Kerajaan-kerajaan lain di Jawa juga sebagai kerajaan maritim, yaitu Kaling, Medang, Kahuripan, Kadiri, dan Singasari, bahkan kerajaan Islam Pajang. Mereka mempunyai armada laut yang kuat, baru pada masa Senapati mereka meninggalkan karakter maritim. Hal ini diperparah pada masa penjajahan Belanda yang melakukan rekayasa sosial, sehingga bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa agraris hingga kini.

Penelitian arkeologi di pulau-pulau kecil dan terdepan di wilayah Sumatera bagian utara, menunjukkan adanya potensi tinggalan arkeologis serta jiwa bahari masyarakat penghuninya sejak masa prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, hingga masa kolonial. Mereka

meninggalkan jejak-jejak kehidupan masa lalu melalui tinggalan-tinggalan budayanya yang masih bisa ditemukan saat ini walaupun hanya berupa fragmentaris.

Potensi tinggalan arkeologis di pulau-pulau kecil dan terdepan menunjukkan bahwa pulau-pulau itu sudah dihuni sejak lama, sehingga saat inipun tentu dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat serta untuk legalitas wilayah.

Potensi tinggalan arkeologis di pulau-pulau kecil dan terdepan juga dapat membantu penelusuran sejarah Indonesia, khususnya sejarah kemaritiman seperti jalur migrasi maupun jalur-jalur perdagangan laut.

Potensi tinggalan arkeologis di pulau-pulau kecil dan terdepan juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata budaya berbasis kelautan. Potensi tinggalan arkeologis di pulau-pulau kecil dan terdepan dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan ekonomi kreatif.

4.2. Saran

Pengembangan berbagai potensi tinggalan arkeologis di pulau-pulau kecil dan terdepan yang merupakan hasil penelitian arkeologi merupakan kontribusi arkeologi bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan terdepan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk mempercepat proses pengembangan pulau-pulau kecil dan terdepan, khususnya di Sumatera bagian utara serta guna

mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, disarankan:

1. Reposisi kebijakan kelautan segera diwujudkan agar seluruh potensi kelautan yang luar biasa, seperti kekayaan hayati, keindahan alam, serta pertambangan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembalikan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari atau bangsa maritim.
3. Meningkatkan kegiatan penelitian arkeologi di pulau-pulau kecil dan terdepan, khususnya di Sumatera bagian utara untuk menggali potensi tinggalan arkeologisnya, sehingga kontribusi arkeologi bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan terdepan semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijoyo, Suwarno. 2005. *Konsolidasi Wawasan Maritim Indonesia*. Jakarta: Pakar.
- Koestoro, Lucas Partanda, dkk. 2001. "Penelitian Arkeologi di Pulau Lingga, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau". *Berita Penelitian Arkeologi No. 05*. Balai Arkeologi Medan.
- Koestoro, Lucas Partanda, dkk. 2004. "Arkeologi Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau". *Berita Penelitian Arkeologi No. 11*. Balai Arkeologi Medan.
- Koestoro, Lucas Partanda. 2007. *Laporan Penelitian Arkeologi: Penelitian Arkeologi di Pulau Cinguk, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat*. Balai Arkeologi Medan.
- Kusumastanto, H. Tridoyo. 2002. *Reposisi "Ocean Policy" dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di era Otonomi Daerah*. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Kebijakan Ekonomi Perikanan dan Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- Meilink-Roelofs, MAP. 1962. *Asian Trade And European Influence In The Indonesian Archipelago Between 1500 And About 1630*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Nugroho, Irawan Djoko. 2011. *Majapahit Peradaban Maritim: Ketika Nusantara Menjadi Pengendali Pelabuhan Dunia*. Jakarta: Suluh Nuswantara Bakti.
- Rais, Jacob, et al. 2008. *Toponimi Indonesia: Sejarah Budaya Bangsa yang Panjang dari Permukiman Manusia dan Tertib Administrasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Selling, Eleanor, 1981. *The Evolution Of Trading States In Southeast Asia Before The 17th Century*. Ph.D thesis in Columbia University
- Simatupang, Defri Elias, dkk. 2012. "Persepsi Masyarakat dan Potensi Konflik terhadap Pengembangan Situs Bukit Kerang Kawal Darat di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau". *Berita Penelitian Arkeologi No. 27*. Balai Arkeologi Medan.
- Soedewo, Ery, dkk. 2013. *Laporan Penelitian Arkeologi: Situs Pulau Kampai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara*. Balai Arkeologi Medan.
- Suhadi, Machi. 1999. *Laporan Penelitian Arkeologi: Penelitian Epigrafi situs Pasir Panjang, kecamatan Karimun, kabupaten Kepulauan Riau, provinsi Riau*. Balai Arkeologi Medan.
- Susilowati, Nenggih. 2011. "Mozaik Arkeologi di Ujung Negeri, Potensi dan Prospeknya". *Berkala Arkeologi Sangkhakala vol. XIV No. 27, April 2011*. Balai Arkeologi Medan.

Sutrisno, Deni dan Repelita Wahyu Oetomo. 2012. "Survei Arkeologi di Gugusan Pulau-pulau Terluar di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara". *Berita Penelitian Arkeologi* No. 27. Balai Arkeologi Medan.

Utomo, Bambang Budi. 2007. *Pandanglah Laut Sebagai Pemersatu Nusantara*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Wiradnyana, Ketut. 1998/1999. *Laporan Penelitian Arkeologi: Survey Megalitik di Pulau Ungar, Kecamatan Kundur, Kabupaten Riau Kepulauan, Provinsi Riau*. Balai Arkeologi Medan.

Wolters, O.W. 2011. *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagaan Dunia Abad III – Abad VII*. Jakarta: Komunitas Bambu.